

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Sebagai Variabel Moderasi

Christine Jois Karubaba[✉]

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja anggota DPRD, dengan pengawasan anggaran daerah (APBD) sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini didasarkan pada peran penting anggota DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada anggota DPRD dari kedua kabupaten dan dianalisis menggunakan model regresi moderasi. Analisis bertujuan untuk menguji peran moderasi pengawasan APBD dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen (pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi) dan variabel dependen (kinerja anggota DPRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggota DPRD. Selain itu, pengawasan keuangan daerah terbukti memperkuat hubungan tersebut, terutama meningkatkan dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami anggaran, disertai komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, didukung oleh sistem pengawasan APBD yang efektif, dapat meningkatkan kinerja legislatif di tingkat daerah.

Kata kunci: Pengetahuan Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja DPRD, Pengawasan APBD

Abstract

This study aims to analyze the influence of council members' budgetary knowledge, accountability, and transparency on the performance of Regional People's Representative Council (DPRD) members, with regional financial oversight (APBD supervision) as a moderating variable. The research was conducted on DPRD members in Nabire Regency and Dogiai Regency, Central Papua Province. The study is grounded in the crucial role of DPRD members in ensuring effective, transparent, and accountable regional financial management to realize good governance. The research employed a quantitative method with a survey approach. Data were collected through questionnaires distributed to DPRD members from both regencies and analyzed using a moderation regression model. The analysis aimed to examine the moderating role of APBD supervision in strengthening or weakening the relationship between the independent variables (budgetary knowledge, accountability, and transparency) and the dependent variable (DPRD members' performance). The results show that budgetary knowledge, accountability, and transparency have a positive effect on DPRD members' performance. Furthermore, regional financial oversight is proven to strengthen these relationships, particularly enhancing the impact of accountability and transparency on performance. These findings indicate that improving the capacity of DPRD members in understanding budgets, along with a strong commitment to the principles of accountability and transparency, supported by an effective APBD supervision system, can enhance legislative performance at the regional level.

Keywords: Budgetary Knowledge, Accountability, Transparency, DPRD Performance, APBD Oversight

✉ Corresponding author :

Email Address : christinekarubaba1@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lemahnya penegakan hukum, dominasi monopoli dalam aktivitas ekonomi, serta rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terhambatnya proses pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, serta munculnya konflik sosial di berbagai daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi elemen penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Kesetaraan ini tidak hanya bermakna dalam hal otoritas, tetapi juga dalam tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menjalankan perannya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan menentukan kualitas kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di tingkat daerah.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi banyak kendala. Mahuse et al. (2010) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, lemahnya kapasitas kepemimpinan, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya komitmen anggota dewan. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan anggota dewan, terutama dalam hal penguasaan materi anggaran dan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rais (2016) juga mengungkap bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan dan komitmen terhadap prinsip good governance menjadi determinan penting dalam peningkatan kinerja lembaga legislatif di daerah.

Fenomena lemahnya pengawasan juga terlihat dalam praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Di Kabupaten Nabire, kinerja DPRD periode 2014–2019 dinilai tidak menggembirakan karena minimnya pengawasan terhadap kinerja eksekutif serta rendahnya respons terhadap kebutuhan publik. Sementara di Kabupaten Dogiyai, DPRD mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi legislasi akibat keterbatasan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dan lebih mengandalkan Tata Tertib (Tatib) internal yang tidak mencakup substansi kebijakan publik.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan upaya untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD, terutama dalam aspek pengetahuan tentang anggaran, serta penegakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) juga perlu dioptimalkan agar mampu menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara kualitas individu anggota DPRD dan kinerjanya dalam menjalankan tugas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja anggota DPRD, dengan pengawasan APBD sebagai variabel moderasi, yang difokuskan pada DPRD Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Peran (Role Theory)

Teori peran menjelaskan bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh posisi sosial yang mereka tempati, di mana setiap posisi memiliki seperangkat ekspektasi dan norma tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggota DPRD menempati peran strategis sebagai pengawas pelaksanaan anggaran (APBD). Keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi ini sangat bergantung pada pemahaman dan penguasaan terhadap peran tersebut, termasuk kemampuan teknis seperti pengetahuan anggaran, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Teori ini menekankan bahwa perilaku pengawasan yang efektif muncul dari kesadaran akan peran sosial dan profesional yang dijalankan dalam struktur pemerintahan.

Kinerja Anggota DPRD

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Menurut Mangkunegara (2013:67) Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance yakni prestasi kerja atau kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini (Aira, 2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut : Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Anggota DPRD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2)

Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/ usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Manginte, et.al., 2015)".

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan (Manginte, dkk, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa tingkat signifikansi pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) yaitu 0,002. Tingkat signifikansi variabel PDTA lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliusman (2012) dan Aira (2015).

Aira (2015) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) dihasilkan. Tingkat pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan yang diukur dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan. Dimana untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop, pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan kualitas pengetahuan yang optimal serta pengawasan dapat dilakukan dengan efektif.

H1 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggota DPRD

Akuntabilitas

Novatianti dan Nurmalita (2015) mengemukakan bahwa Anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dihasilkan.

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Anggota DPRD

Transparansi

Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.

H3: Tranparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggota DPRD

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas.....

Pengetahuan Dewan tentang anggaran,Akuntabilitas,Transparansi

Perhatian terhadap isu akuntabilitas Publik dan transparansi semakin meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut.

Menurut Hadi Sumarsono transparansi adalah " keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat". Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

H4: Pengetahuan dewan tentang anggaran, Akuntabilitas,Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Anggota DPRD

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai periode 2019–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, dengan total responden sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan melalui *mail survey* untuk daerah yang sulit dijangkau. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi moderasi untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja anggota DPRD, dengan pengawasan APBD sebagai variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, Z, dan Y dinyatakan valid karena nilai r hitung $> r$ tabel dan signifikan ($p < 0,05$).

Nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel berada di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Min	Max	SD
Pengetahuan Anggaran (X1)	50	4.10	3.20	4.80	0.45
Akuntabilitas (X2)	50	4.05	3.00	4.75	0.48
Transparansi (X3)	50	4.00	2.90	4.85	0.52
Pengawasan Keuangan (Z)	50	4.12	3.10	4.90	0.40
Kinerja DPRD (Y)	50	4.20	3.50	4.90	0.38

Sumber : Data diolah,2020

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai rata-rata antara 4.00 hingga 4.20 pada skala Likert 1–5. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden, yaitu anggota DPRD Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, terhadap pengetahuan anggaran, akuntabilitas, transparansi, pengawasan keuangan daerah, dan kinerja DPRD berada pada kategori tinggi. Nilai

minimum dan maksimum masing-masing variabel juga menunjukkan variasi yang wajar tanpa ekstremitas, sementara nilai standar deviasi yang relatif rendah mencerminkan konsistensi jawaban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden secara umum memiliki pandangan yang positif terhadap seluruh variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (KS) menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), yang berarti data residual terdistribusi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara statistik.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Artinya, masing-masing variabel bebas tidak saling memengaruhi secara linear dalam tingkat yang tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada semua variabel (Sig. > 0,05). Ini menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga varians error bersifat konstan dan model regresi dinyatakan stabil.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.125 + 0.375X_1 + 0.295X_2 + 0.280X_3 + e$$

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Sig. (p-value)	Keterangan
Pengetahuan Anggaran (X1)	0,375	0.001	Signifikan
Akuntabilitas (X2)	0,295	0.004	Signifikan
Transparansi (X3)	0,280	0.010	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2020

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,625 menunjukkan bahwa 62,5% variasi dalam kinerja anggota DPRD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model. Sisanya, sebesar 37,5%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Selain itu, nilai F hitung = 21,87 dengan signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model regresi yang digunakan valid secara statistik untuk menjelaskan pengaruh variabel pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja DPRD.

Uji Moderasi (MRA)

Model interaksi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1Z + b_6X_2Z + b_7X_3Z + e$$

Tabel 3. Hasil Uji Moderasi (MRA)

Interaksi	Koefisien (β)	Sig. (p-value)	Keterangan
$X_1 \times Z$	0.210	0.028	Signifikan (Moderasi Positif)

$X_2 \times Z$	0.105	0.082	Tidak signifikan
$X_3 \times Z$	0.020	0.420	Tidak signifikan

Sumber : Data diolah, 2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Interaksi Pengetahuan Anggaran $\times$ Pengawasan ($X_1 \times Z$) signifikan ($\beta = 0,210$; $p = 0,028$), artinya pengawasan memperkuat pengaruh pengetahuan anggaran terhadap kinerja DPRD.
2. Interaksi Akuntabilitas $\times$ Pengawasan ($X_2 \times Z$) tidak signifikan ($p = 0,082$), sehingga pengawasan tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas.
3. Interaksi Transparansi $\times$ Pengawasan ($X_3 \times Z$) juga tidak signifikan ($p = 0,420$), sehingga pengawasan tidak memoderasi pengaruh transparansi.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Kinerja Anggota DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD. Hal ini konsisten dengan teori dan temuan sebelumnya (Sopanah, 2007), yang menegaskan bahwa pemahaman atas siklus anggaran memungkinkan anggota dewan melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja DPRD

Akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD. Ketika anggota DPRD menjalankan fungsi representatif secara terbuka dan bertanggung jawab, hal ini memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas kerja mereka.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja DPRD

Transparansi keuangan berdampak positif terhadap kinerja, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Keterbukaan dalam dokumen anggaran dan pelaporan membuat publik dapat menilai capaian kinerja dewan secara objektif.

Peran Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi

Pengawasan keuangan daerah memoderasi hubungan antara pengetahuan anggaran dan kinerja DPRD secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengawasan DPRD terhadap APBD, maka pengetahuan yang dimiliki anggota dewan akan semakin efektif mendorong kinerja mereka.

Namun, pengawasan keuangan tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja DPRD. Hal ini bisa diartikan bahwa pengawasan keuangan oleh DPRD tidak cukup memperkuat efek akuntabilitas dan transparansi, mungkin karena akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan mandiri melalui mekanisme regulatif lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD. Selain itu, pengawasan keuangan daerah secara signifikan memoderasi hubungan antara pengetahuan anggaran dan kinerja DPRD, namun tidak memoderasi hubungan akuntabilitas maupun transparansi terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pengetahuan anggaran dan penguatan fungsi pengawasan untuk mendorong kinerja legislatif yang lebih optimal.

Referensi:

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
- A. D., Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)
- Alamsyah. (1997). Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman [Tesis]. Jogjakarta: MAP UGM.
- Akintoye(2008) Budget and Budgetary Control for Improved Performance: A Consideration for Selected Food and Beverages Companies in Nigeria
- Aras Aira (2015) Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas.
- Carolyn Ward & David Preece (2012) Board member development in the public, voluntary and social housing sectors. (Teesside University Business School, Teesside University, Middlesbrough, UK
- Erlina dan Mulyani, Sri. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan.
- Erlina, 2011. Metodologi Penelitian : Untuk Akuntansi, USU PRESS, Medan.
- Ghozali, Imam. (2006). Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Handoyo & Trisnowati, Juni. (2013). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Smooting Vol.9(5). Fakultas ekonomi Universitas Surakarta.
- Hasnah Kamardi (2006) Internal corporate governance and board performance in monitoring roles Evidence from Malaysia
- Haryani, Rizki. (2011). Pengaruh Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus di DPRD Provinsi Sumatera Utara) [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. .
- Manginte, dkk. 2015. Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pegawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). SNA XVIII
- Novatiani, R. Ait & Lestari, Nurmalita. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. Widyatama Repository. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Nurhayati. (2008). Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 [Tesis]. Padang: Universitas Andalas.
- Putri, F. S., dkk. (2016). Pengaruh personal background, political background dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, 5(2).
- Pramita, Yulianda Devi & Andriyani, Lilik. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran deang Pengawasan Dewan Pada Keuang Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII. Universitas Jendral

- Sudirman , Purwokerto.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat daerah.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Rosita, Ni Made Ana., Herawati, Nyoman Trisna.& Sinarwati, Ni Kadek. (2014). Pengaruh latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan ewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Krbijakan Publik. E-Jurnal S1 Ak 2(1). Universitas Pendidikan Ganesa, Singaraja.
- Sari, Imelda. (2010). Pengaruh Personal Background, dan Political Background serta Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang) [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
- Siregar, Liper. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator pada Pemerintahan Kota Pemantang Siantar [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana
- Sopannah. & Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat da Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI . 16-17 Oktober, Surabaya.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Utami, Kurnia & Syofyan, Efrizal. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. 1(1): 63-86. FE UNP, Padang.
- Wardayani. (2010). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Pemoderasi [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
- Werimon, Simson., Ghozali, Imam. & Nazir, Mohammad. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. 26-28 Juli, Makasar.
- Widiyaningsih, Aristansi & Pujirahayu, Imaniar. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Penelitian Pada DPRD Kabupaten Sukabumi). Media Riset Akuntansi. Program Studi akuntansi Universitas Bakrie, Jakarta.
- Wiyana, Anim. (2011). Pengaruh Personal Background dan political Culture Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi. STIEM Bongaya, Makasar.
- Yudono, Bambang. (2002). Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan

Pemerintah
jendela3.htm.

Daerah.[http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/](http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm)

<http://www.nabire.net/kinerja-dprd-nabire-periode-2014-2019-tidaklah-menggembirakan/>
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LgaY8vx1l44J:https://www.pasificpos.com/item/35150-3-tahun-berturut-nabire-raih-opini-wtp+&cd=15&hl=id&ct=clnk&gl=id>